

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, kedamaian, dan keteraturan dalam suatu wilayah atau masyarakat	Nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban diperoleh dari (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat x Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran).		98,52	98,8	99,1	99,4	99,7	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase penegakan Perda dan Perkada adalah indikator yang mengukur sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ditegakkan sesuai	[Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi] x 100%		59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	77,27	81,82	81,82	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		dengan standar yang ditetapkan											
3.	Jumlah PPNS pada Satpol PP	PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS		4	5	6	7	8	9	10	10	
4.	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari deteksi dini, cegah dini, pengawalan, pengaman hingga penindakan terhadap pelanggaran	[Jumlah SOP yang tersedia / Jumlah SOP yang dibutuhkan = 10] X 100%		100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Sarana Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	[Jumlah sarana prasarana yang tersedia / Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan = 4] X 100%		100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat	Diklat Dasar Satpol PP adalah sebuah proses pendidikan dan pelatihan formal bagi	[Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar / Jumlah Keseluruhan		65,63	60,00	67,5	75	82,5	90	97,5	97,5	

